

SKRIPSI

PENERAPAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



Pembimbing :
Diana Arma, SH., MH
Dr. Nilma Suryani, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum patut dipertimbangkan adanya *Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generally* dalam Pasal 63 ayat 2 yang menjelaskan tentang ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Oleh sebab adanya asas tersebut terdapat banyak kasus pejudian di Kota Padang didakwakan dengan pasal 303 KUHP yang mana merupakan pengaturan umum. Banyak putusan tentang perjudian online, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternative menggunakan Pasal 303 KUHP. Kasus-kasus tersebut melalui fakta-fakta pengadilan serta alat buktinya menjelaskan terang tentang perjudian online. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan diteliti pertama Penerapan Dakwaan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang, Kedua Alasan Penuntut Umum Mendakwa banyak Kasus Perjudian Online dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE Mengatur Secara Khusus tentang Perjudian Online. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang dan data sekunder dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan dakwaan terhadap kasus perjudian online jaksa melakukan beberapa hal, yang utama sekali jaksa harus melengkapi unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Alasan penuntut umum mendakwa banyak kasus perjudian online dengan pasal 303, sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur secara khusus perjudian online yaitu pada banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terdapat kekurangan-kekurangan alat bukti untuk melengkapi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU No No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Perjudian Online, Dakwaan, Penuntut Umum*